

LAPORAN TAHUNAN



2025

FORUM KOMUNIKASI DIFABEL CIREBON

Jalan RA Kartini No. 39, Dusun Durajaya, Kecamatan Greged, Kabupaten Cirebon - 45175

e-mail: Fkdc.cirebon@gmail.com

Telepon : 085210999191

Daftar isi

- 
- 01 Pengantar
 - 02 Profil Lembaga
 - 03 Program dan Kegiatan
 - Proyek SOLIDER
 - Konseling Sebaya
 - Advokasi Berbasis Bukti
 - Pemberdayaan Ekonomi
 - 04 Capaian 2025
 - 05 Penerima Manfaat Program SOLIDER
 - 06 Cerita Perubahan
 - 07 Tantangan dan Pembelajaran
 - 08 Laporan Keuangan

Pengantar

DIREKTUR

**Abdul
Mujib**



Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Forum Komunikasi Difabel Cirebon (FKDC) dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Program FKDC yang merupakan laporan kegiatan selama dua tahun di enam desa pada dua kecamatan di Kabupaten Cirebon.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan program kepada para mitra donor, khususnya Program INKLUSI, SIGAB Indonesia, serta mitra pendukung lainnya, sekaligus sebagai dokumentasi atas capaian, tantangan, dan pembelajaran selama implementasi program di tingkat desa.

Selama periode pelaksanaan, FKDC telah melaksanakan berbagai kegiatan penguatan kapasitas, advokasi kebijakan, serta pengarusutamaan inklusi disabilitas di Kecamatan Lemahabang yang meliputi Desa Lemahabang, Desa Tuk Karangsuwung, dan Desa Leuwidingding. Serta Kecamatan Greged yang meliputi Desa Durajaya, Desa Nanggela, dan Desa Sindang Kempeng.

Keberhasilan pelaksanaan program ini tidak terlepas dari dukungan dan sinergi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, khususnya Bupati Cirebon, serta perangkat daerah terkait, antara lain Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Bagian Hukum, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPRIDA), Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Dukungan tersebut menjadi fondasi penting dalam penguatan kebijakan dan praktik pembangunan inklusif di tingkat daerah dan desa.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada INKLUSI, SIGAB Indonesia, Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, pemerintah kecamatan dan desa, pendamping desa, serta seluruh komunitas dan pegiat disabilitas yang telah berkontribusi aktif dalam pelaksanaan program ini. Laporan ini kami harap dapat menjadi bahan evaluasi, referensi pembelajaran, dan dasar pengembangan kebijakan bagi para mitra dan pemangku kepentingan dalam memperkuat keberlanjutan program inklusi disabilitas di Kabupaten Cirebon.

PROFIL LEMBAGA

Forum Komunikasi Difabel Cirebon (FKDC) didirikan pada tahun 2007 sebagai respons atas berbagai tantangan struktural dan sosial yang dihadapi penyandang disabilitas dan Orang yang Pernah Mengalami Kusta (OYPMK), seperti self-stigma, stigma sosial, diskriminasi, serta keterbatasan akses terhadap informasi dan layanan dasar. Kondisi tersebut menyebabkan penyandang disabilitas dan OYPMK terpinggirkan dari kehidupan sosial, ekonomi, dan proses pengambilan keputusan di tingkat komunitas.

FKDC hadir sebagai ruang kolektif untuk saling menguatkan, membangun kepercayaan diri, dan memperjuangkan pemenuhan hak secara bermartabat. FKDC memandang ketidakadilan yang dialami sebagai persoalan sistem sosial yang belum inklusif.

Misi FKDC adalah mewujudkan lingkungan yang inklusif dan bebas hambatan bagi penyandang disabilitas dan OYPMK melalui pemberdayaan, advokasi, penguatan kapasitas komunitas, serta kolaborasi lintas sektor dan komunitas agar mereka mampu menyuarkan hak-haknya, berpartisipasi secara bermakna, dan memperoleh kesempatan yang setara tanpa diskriminasi.

PRGRAM SOLIDER

STRENGTHENING SOCIAL INCLUSION FOR DISABILITY EQUITY AND RIGHTS



Program SOLIDER dilaksanakan untuk menjawab beberapa tantangan yang masih dihadapi penyandang disabilitas, seperti diskriminasi dan eksklusi yang bersifat struktural dan kultural, keterbatasan akses terhadap layanan dasar, dominasi pekerjaan di sektor informal dengan tingkat kesejahteraan rendah, serta ketidaksinambungan antara arah kebijakan dan program prioritas dari tingkat provinsi hingga desa yang berdampak pada kerentanan difabel terhadap ketidakadilan hukum.

Melalui penguatan desa inklusif berbasis GEDSI, pendataan difabel, peningkatan partisipasi dan penerimaan sosial, penguatan Kelompok Difabel Desa (KDD) sebagai wadah advokasi hak, serta optimalisasi peran Unit Layanan Disabilitas (ULD) dalam mendukung akses ketenagakerjaan, Program SOLIDER berupaya mendorong pemenuhan hak dan kemandirian penyandang disabilitas secara berkelanjutan, dengan dukungan Kemitraan Indonesia–Australia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI) melalui SIGAB Indonesia.



PENCAPAIAN 2025

01 Kebijakan dan Regulasi

Terlaksananya musrembang tematik penyandang disabilitas, Adanya draft Peraturan Bupati no 2 tahun 2024 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan draft RAD PD pera disabilitas dalam pembangunan inklusif Kabupaten Cirebon.

5 Desa (Durajaya, Nanggela, Sindangkempeng, Lemabang, dan Tuk Karangsuwung telah memiliki Peraturan desa tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.



02 Pemberdayaan Kelompok Difabel Desa (KDD)

Mengembangkan peer support melalui pelatihan dan perekrutan konselor berbasis komunitas.

KDD terlibat dalam kegiatan di tingkat Kabupaten: Pekan Raya Pembangunan Daerah dan Bazaar Bog Show Kepemudaan

Mempersiapkan dan memperkuat partisipasi difabel dalam Musrenbang Tematik dan perencanaan daerah

KDD mulai terlibat dalam Musrenbang, pengesahan APBDes, koperasi desa, dan kegiatan layanan sosial



PENCAPAIAN 2025

03 Ketenagakerjaan dan Ekonomi



Produk usaha KDD dilibatkan dalam beberapa di Bazar tingkat Kabupaten

Berkoordinasi dengan ULD untuk fasilitasi informasi, pemagangan, dan sosialisasi ketenagakerjaan inklusif.



Dokumentasi praktik baik ULD melalui produksi video "ULD Disnaker Berkarya, Difabel Berdaya"

10 perusahaan telah mempekerjakan difabel dengan total 735 tenaga kerja difabel.

50 perusahaan mendapatkan penguatan perspektif GEDSI



04 Advokasi dan Jaringan

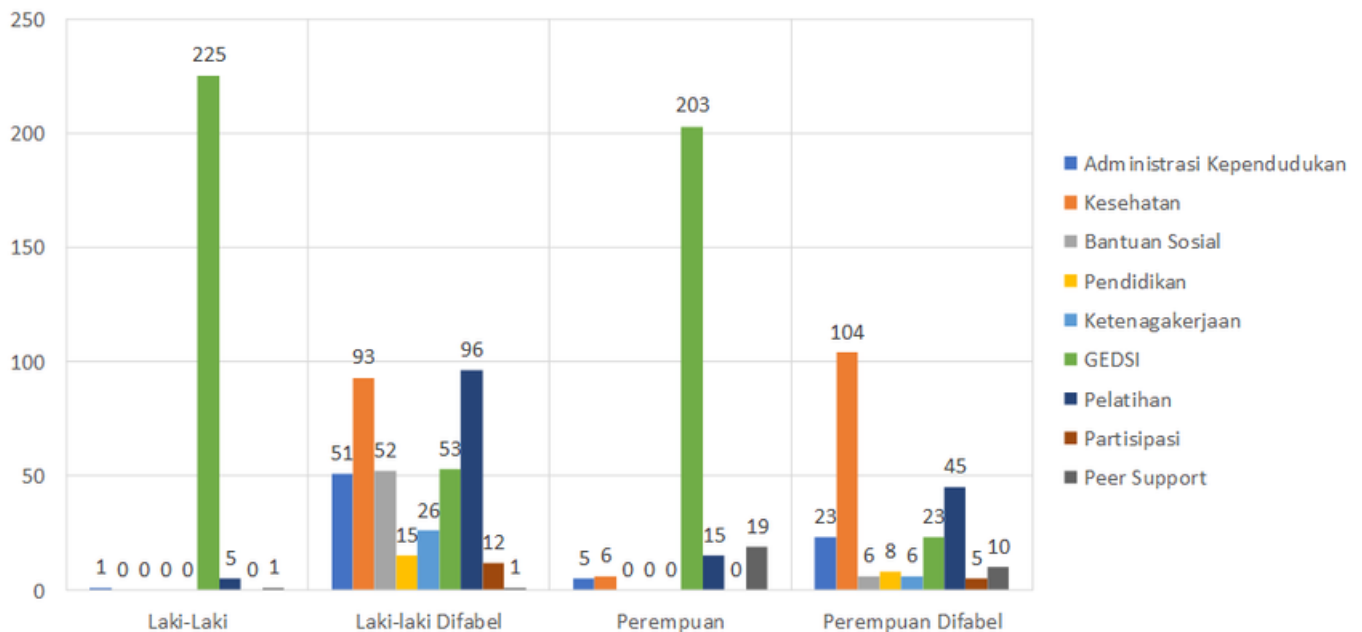


Pembentukan Forum Disabilitas Kabupaten Cirebon (BrajaDifa) sebagai wadah kolaborasi lintas komunitas difabel.

Terlibat dalam agenda strategis seperti RAD PD, dan Pemilu Inklusif. Panitia lokal pelaksanaan TEMU INKLUSI VI



PENERIMA MANFAAT PROGRAM SOLIDER



Penerima manfaat adalah individu penyandang disabilitas maupun non-disabilitas yang memiliki kebutuhan terhadap pemenuhan hak-hak dasar dan layanan sosial. Kebutuhan tersebut mencakup akses terhadap layanan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, serta layanan dasar lainnya.

Dalam proses pemenuhan kebutuhan tersebut, penerima manfaat memperoleh pendampingan, pelayanan, dan bantuan yang difasilitasi oleh anggota Kelompok Difabel Desa (KDD). Pendampingan dilakukan secara partisipatif dan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masing-masing individu, sehingga layanan yang diberikan tepat sasaran dan berkeadilan.

Melalui peran aktif anggota KDD, penerima manfaat diharapkan mampu memperoleh akses layanan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian mereka. Selain itu, proses ini juga menjadi bentuk nyata bahwa penyandang disabilitas memiliki kapasitas dan peran strategis dalam membantu pemenuhan hak-hak dasar, baik bagi sesama difabel maupun masyarakat non-difabel, sekaligus mendorong terwujudnya masyarakat yang saling mendukung dan inklusif.

DUKUNGAN SEBAYA



Kunjungan pertama difokuskan pada pengenalan dan membangun relasi yang aman dan nyaman agar klien merasa percaya untuk berbagi pengalaman dan permasalahan yang dihadapi. Kunjungan kedua, yang dilaksanakan sekitar dua minggu setelah kunjungan pertama, bertujuan untuk menggali lebih dalam permasalahan yang dialami klien, upaya yang telah dilakukan, serta sejauh mana klien berani membuka diri kepada keluarga. Pada kunjungan ketiga, pendamping memfasilitasi keterlibatan keluarga untuk memberikan dukungan, sekaligus menyepakati langkah-langkah bersama dalam mengatasi permasalahan klien.

Program peer support atau dukungan sebaya yang dilaksanakan FKDC melibatkan penyandang disabilitas sebagai pendamping untuk memberikan dukungan sosial dan motivasional kepada difabel yang masih mengalami stigma. Pendampingan dilakukan melalui tiga kali kunjungan kepada klien.



Hasil pendampingan menunjukkan bahwa sebagian besar klien mulai mengalami peningkatan kepercayaan diri dan merasa tidak lagi menghadapi permasalahan secara sendiri. Selain itu, keluarga klien menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap isu disabilitas serta cara memberikan dukungan yang lebih tepat, yang tercermin dari keterbukaan dalam berdiskusi dan kesediaan terlibat aktif dalam proses pendampingan

SOSIO-EKONOMI

FKDC mengembangkan program pembangunan sosial ekonomi yang berfokus pada peningkatan keterampilan kerja, penguatan usaha ekonomi produktif, serta pendampingan kewirausahaan bagi penyandang disabilitas. Program ini bertujuan memperluas akses difabel terhadap peluang kerja dan usaha secara inklusif. Dalam pelaksanaannya, FKDC berkolaborasi dengan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan (ULD) untuk memfasilitasi akses informasi lowongan kerja dan pelatihan kejuruan, sehingga meningkatkan peluang difabel untuk memasuki dunia kerja formal. Selain itu, FKDC juga berperan sebagai penghubung antara difabel dan program pemberdayaan ekonomi pemerintah guna mendukung pengembangan usaha yang mandiri dan berkelanjutan.



CERITA PERUBAHAN

Dari Pengakuan ke Perubahan Nyata: Perjalanan Desa Durajaya Menjadi Desa Inklusif



Pada tahun 2023, Kelompok Difabel Desa (KDD) di Desa Durajaya masih berjalan secara terbatas. Meski telah memiliki legalitas, ruang partisipasi bagi penyandang disabilitas belum terbuka sepenuhnya, dan isu disabilitas belum menjadi bagian dari arus utama pembangunan desa. Perubahan mulai terlihat pada tahun 2024 ketika Program SOLIDER (Strengthening Social Inclusion for Disability Equity and Rights) hadir melalui kolaborasi SIGAB Indonesia dan Forum Komunikasi Difabel Cirebon (FKDC) dengan dukungan INKLUSI.

Melalui pendampingan intensif dan penguatan perspektif Gender, Equity, Disability, and Social Inclusion (GEDSI), pemerintah desa mulai memandang penyandang disabilitas sebagai subjek pembangunan yang setara. Pemerintah Desa Durajaya kemudian menerbitkan kembali Surat Keputusan KDD dan mengakui Difa Durajaya sebagai lembaga desa resmi. Sejak saat itu, KDD terlibat aktif dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), program desa, hingga forum-forum strategis lainnya. *"Difabel bukan kelompok yang harus dikasihani. Mereka adalah bagian dari warga desa yang punya hak dan potensi yang sama,"* ujar Kuwu Durajaya dalam salah satu pertemuan desa.

Komitmen inklusivitas tersebut diwujudkan melalui langkah-langkah nyata. Pada tahun 2025, Pemerintah Desa Durajaya mengalokasikan anggaran untuk pembangunan aksesibilitas di lima titik layanan publik dan mengesahkan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Bagi anggota KDD, perubahan ini membawa makna yang mendalam. *"Sekarang kami tidak hanya diundang, tapi didengar. Kami merasa diakui sebagai bagian dari desa,"* ungkap Linda Purnama Sari, Ketua KDD Difa Durajaya.

Sampai dengan saat ini, Program SOLIDER telah berkontribusi pada meningkatnya partisipasi difabel, perubahan sikap dan praktik GEDSI, serta lahirnya kebijakan desa yang inklusif dan berkelanjutan. Kisah Desa Durajaya menunjukkan bahwa dengan pendampingan yang tepat dan kemitraan yang kuat, perubahan nyata menuju masyarakat inklusif dapat dimulai dari tingkat desa.



CERITA PERUBAHAN

Menguatnya Inklusi Ketenagakerjaan Difabel di Kabupaten Cirebon

Unit Layanan Disabilitas (ULD) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon telah berdiri sejak tahun 2021 sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dengan dukungan Surat Keputusan Kepala Dinas dan Surat Edaran Bupati terkait kuota kerja difabel, ULD menjadi jembatan antara pencari kerja difabel dan dunia usaha. Namun, meski regulasi telah tersedia, kepatuhan perusahaan dan pemanfaatan layanan ULD masih berjalan perlahan.



Perubahan signifikan mulai terlihat pada tahun 2024, ketika Program SOLIDER–INKLUSI mulai membangun kolaborasi strategis dengan ULD Ketenagakerjaan. Melalui rangkaian sosialisasi kebijakan ketenagakerjaan inklusif dan pelatihan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) bagi perusahaan, ruang dialog antara pemerintah, dunia usaha, dan komunitas difabel terbuka lebih luas. Dampaknya terasa nyata—perusahaan mulai melihat tenaga kerja difabel bukan sebagai beban regulasi, melainkan sebagai potensi.

“Pada tahun 2024, perubahan di sektor ketenagakerjaan difabel sangat masif. Ini terlihat jelas setelah adanya kolaborasi antara ULD Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon dengan Program SOLIDER melalui FKDC,” ungkap Agus Susanto, SH., M.Si, Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon. Pasca kegiatan sosialisasi dan pelatihan, beberapa perusahaan langsung berkonsultasi dengan ULD, bahkan melakukan penyesuaian lingkungan kerja agar lebih inklusif.

Perubahan tersebut dirasakan langsung oleh penyandang disabilitas pencari kerja. Apipudin, salah satu tenaga kerja difabel, menceritakan pengalamannya: *“Dengan adanya ULD Ketenagakerjaan, saya sangat terbantu mendapatkan informasi lowongan kerja. Alhamdulillah, Januari lalu saya diterima bekerja di PT Dahjofoam. Sekarang kondisi ekonomi dan kepercayaan diri saya meningkat, dan di tempat kerja saya diperlakukan setara.”*

Hingga akhir 2025, data ULD Ketenagakerjaan menunjukkan peningkatan drastis jumlah tenaga kerja difabel di sektor formal menjadi 652 orang. Kisah ini menegaskan bahwa ketika regulasi diperkuat dengan pendampingan, kemitraan, dan perubahan perspektif, inklusi ketenagakerjaan tidak hanya menjadi kebijakan, tetapi peluang nyata bagi kehidupan yang lebih bermartabat.

TANTANGAN DAN PEMBELAJARAN

Pelaksanaan program selama periode pelaporan ini tidak terlepas dari berbagai tantangan yang muncul di tingkat kebijakan, kelembagaan, maupun komunitas. Tantangan-tantangan tersebut menjadi bagian penting dari proses pembelajaran organisasi dalam mendorong pembangunan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Beberapa tantangan dan pembelajaran disajikan dalam keterangan dibawah.

Pemahaman

Tingkat pemahaman Kelompok Difabel Desa (KDD) terhadap konsep inklusivitas dan pemberdayaan difabel masih beragam. Diperlukan upaya peningkatan kapasitas yang berkelanjutan agar KDD dapat memposisikan diri tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai aktor pembangunan yang aktif dan strategis

Pemahaman Regulasi

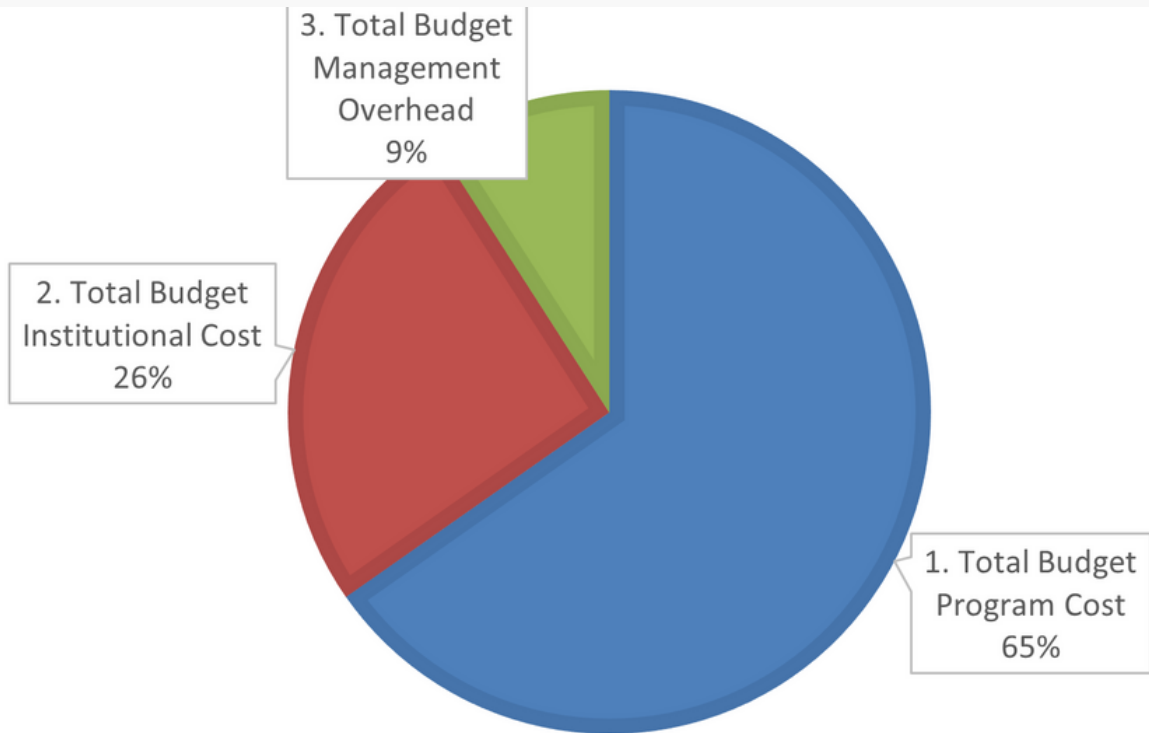
Masih diperlukan pemahaman yang kuat dalam implementasi regulasi Kemendesa PDTT terkait desa inklusif. Pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep dan praktik desa inklusi difabel berimplikasi pada optimalnya dukungan kebijakan dan pendampingan pemerintah desa.

Paradigma dan Stigma

Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap konsep inklusivitas dan pemberdayaan difabel. Upaya peningkatan pemahaman yang berkelanjutan agar KDD mampu diberikan peran sebagai subjek pembangunan masih perlu ditingkatkan



LAPORAN KEUANGAN



PENUTUP

kami menyadari bahwa pelaksanaan Project Desa Inklusi masih menghadapi berbagai tantangan dan keterbatasan, baik dari aspek sumber daya, waktu pelaksanaan, maupun dinamika sosial di tingkat desa. Namun demikian, melalui proses pembelajaran dan pendampingan yang berkelanjutan, program ini telah memberikan kontribusi nyata dalam mendorong terwujudnya desa yang inklusif, partisipatif, dan ramah terhadap difabel.

Dengan dukungan Program INKLUSI serta pendampingan dan kerja sama strategis bersama SIGAB Indonesia, Project Desa Inklusi telah membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi penyandang disabilitas dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan pembangunan desa. Program ini juga memperkuat kapasitas pemerintah desa dan masyarakat dalam memahami hak-hak difabel serta pentingnya pengarusutamaan inklusi dalam kebijakan dan tata kelola desa.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Program INKLUSI, SIGAB Indonesia, Pemerintah Kabupaten Cirebon, pemerintah desa lokasi dampingan, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah mendukung dan berkontribusi dalam pelaksanaan program ini. Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada komunitas dan individu difabel yang telah berpartisipasi aktif sebagai subjek pembangunan desa inklusif.

Kami berharap capaian, praktik baik, dan pembelajaran yang terdokumentasi dalam laporan tahunan ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan dan replikasi Desa Inklusi di wilayah lain. Semoga kolaborasi yang telah terbangun dapat terus berlanjut dan memberikan dampak yang berkelanjutan bagi terwujudnya pembangunan desa yang adil, setara, dan inklusif bagi semua.

“Inklusi difabel bukan belas kasihan, tetapi keadilan dan kesetaraan dalam pembangunan yang tidak meninggalkan siapa pun.”

Terima Kasih